KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pimpinan DPR Kurang Peka Sebagai Wakil Rakyat: Legislasi
Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

LEGISLASI

Pimpinan DPR Kurang Peka sebagai Wakil Rakyat

PENUNDAAN pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menunjukkan pimpinan DPR tidak memperlihatkan fungsinya sebagai wakil rakyat. Beleid menyangkut perlindungan terhadap sedikitnya 4 juta orang pekerja rumah tangga itu sudah diajukan sejak 2004.

"RUU ini sudah kurang lebih tiga kali masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya sudah lebih dari 15 tahun bolak balik kayak setrikaan di-PHP (pemberi harapan palsu) wakil rakyat!" ujar anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, kemarin.

Kekesalan ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Puan menegaskan RUU PPRT ditunda atas keputusan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama.

Irma mempertanyakan urgensi penundaan pengesahan RUU PPRT. Padahal, aturan tersebut penting untuk melindungi pekerja rumah tangga.

"Sebagai wakil rakyat saya tidak terima perlakuan semena-mena ini. Perlindungan dan hak PPRT sama dengan warga negara Indonesia lain. Kenapa yang lain dilindungi dan diakui haknya dalam regulasi, kenapa PPRT tidak?" ujar Irma.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah juga merasa kecewa atas keputusan pimpinan DPR itu.

"Kami tentu kecewa dengan penundaan ini mengingat RUU PPRT memasuki tahun ke-19 sejak kali pertama RUU PPRT diusulkan jaringan masyarakat sipil dan Komnas Perempuan sebagai payung hukum komprehensif perlindungan pekerja rumah tangga," tegasnya.

Ketua Panja RUU PPRT DPR Willy Aditya mengaku kaget dengan keputusan penundaan itu. Untuk itu, Willy akan meminta konfirmasi dari Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel terkait penundaan ini. Pasalnya, dikatakan bahwa penundaan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan DPR RI.

"Kami punya Wakil Ketua DPR, sedang kami konfirmasi apakah benar itu keputusan rapim dan kapan keputusan itu terjadi. Tentu ini sangat disayangkan dengan kondisi seperti ini," tandasnya.

RUU PPRT sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan menugaskan dua menteri untuk melobi DPR agar undang-undang itu segera disahkan.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua *stakeholder*," tegas Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pertengahan Januari lalu. (Des/Dis/Sru/Fah/X-5)